

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kota Salatiga

Halaman 26

DPRD Setujui Suntik Anggaran RSUD

Dampak Klaim BPJS Tak Terbayar

SALATIGA - DPRD Kota Salatiga telah menyetujui anggaran pelayanan rumah sakit atas usulan RSUD Kota Salatiga, akibat krisis keuangan, sebagai dampak tidak dibayarkannya klaim pasien BPJS.

Meskipun demikian, masih perlu pembahasan lagi, karena pelayanan BPJS merupakan program pemerintah dan juga terjadi di rumah sakit lainnya.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Salatiga, Teddy Sulistio, di sela-sela Rapat Paripurna Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD, kemarin. Mantan Sekretaris DPRD dan Kadinas Sosial Pemot Salatiga Amien Singgih, yang telah pensiun dan menjadi caleg PDIP, menggantikan Supriyono yang meninggal karena sakit, beberapa waktu lalu.

"Kami setuju anggaran untuk RSUD Kota Salatiga. Jumlahnya saya lupa. Tapi yang jelas, anggaran itu dalam rangka peningkatan pelayanan rumah sakit kepada masyarakat," kata Teddy.

Teddy menjelaskan, saat ini per-

soalan RSUD sangat pelik, terkait tidak adanya klaim pembayaran BPJS sebagai biaya pengganti pasien yang mengikuti program tersebut. Hal yang juga terjadi di seluruh rumah sakit yang ada di Tanah Air.

Dikhawatirkan bila tidak ada suntikan dana dari APBD maka, kondisi pelayanan RSUD Kota Salatiga akan terganggu, terutama dari ketersediaan obat-obatan. "Tapi suntikan APBD kepada rumah sakit tidak langsung ke RSUD, melainkan lewat Dinas Kesehatan Kota Salatiga," ungkap Teddy.

Rp 6,8 Miliar

Seperti diketahui RSUD Kota Salatiga terancam tidak dapat beroperasi memberikan pelayanan optimal kepada pasien, terutama pasien BPJS. Kondisi tersebut terjadi karena sejak April hingga Agustus, klaim BPJS lebih dari Rp 30 miliar

tidak terbayar. Praktis dalam kurun waktu sekitar 5 bulan tersebut, RSUD menggunakan pembiayaan sendiri untuk menangani pasien BPJS.

Dirut RSUD Kota Salatiga dokter Sri Pamudji Eko Sudarko, mengatakan rata-rata tunggakan BPJS setiap bulan di RSUD Kota Salatiga sekitar Rp 6,8 miliar. Bila dalam lima bulan tidak dibayar

klaim dari BPJS maka bisa dihitung jumlah tunggakannya yang sangat besar mencapai Rp 34 miliar.

Dijelaskannya, terakhir klaim BPJS terbayar pada Maret lalu. Diakuinya kondisi yang sama juga terjadi di rumah sakit lainnya. Sudah ada perbankan yang mengusulkan pembiayaan, tetapi belum ada realisasi terkait persyaratan dan aturannya dalam undang-undang. (H2-61)